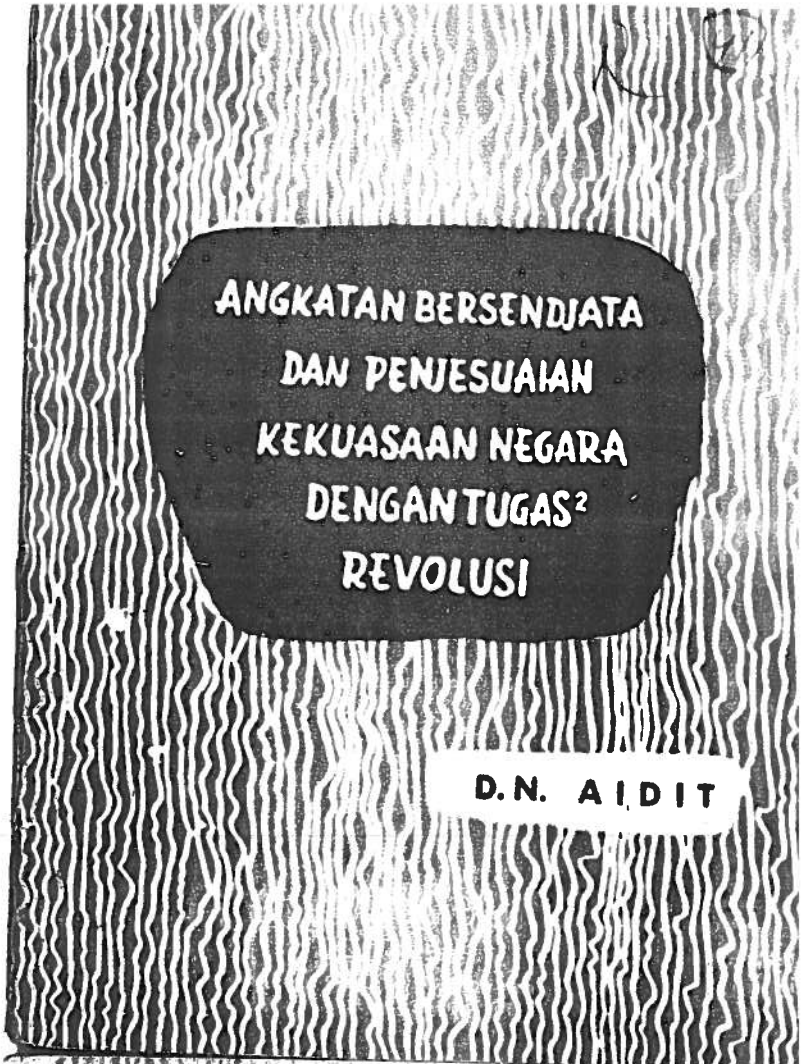

ANGKATAN BERSENDJATA
DAN PENJESUAIAN
KEKUASAAN NEGARA
DENGAN TUGAS² REVOLUSI
D.N. AIDIT

ANGKATAN BERSENDJATA DAN PENJESUAIAN KEKUASAAN NEGARA DENGAN TUGAS² REVOLUSI

(PKI DAN ANGKATAN DARAT – SESKOAD)

II

D. N. Aidit
Menko/Wakil Ketua MPRS dan
Ketua CC PKI

Jajasan „Pembaruan"
Djakarta 1964

Sekedar Pengantar

Pada tanggal 1 Djuli 1964, Menko Wakil Ketua MPRS dan Ketua CCPKI D.N. Aidit, untuk kedua kalinja telah memberikan tjeramah didepan SESKOAD, Bandung. Kali ini temanja jalah *Sistim penjelenggaraan dukungan masjarakat (social support) dan pengawasan masjarakat (social control) bagi Republik Indonesia.*

Dengan persetudjuan penulisnja singkatan tjeramah itu kami bukukan dengan djudul *Angkatan Bersendjata dan penjesuaian kekuasaan negara dengan tugas² revolusi.* Mudah²an penerbitan ini bisa sekedar memberi sumbangan pada melahirkan pengertian jang tepat mengenai pokok² tema jang dibahas jaitu „social control", „social support", „social participation", kekuasaan negara dan revolusi Indonesia, baik dikalangan Angkatan Bersendjata chususnja maupun dikalangan Rakjat pada umumnja, sehingga akan memperkembangkan lebih landjut Dwitunggal Rakjat dan Angkatan Bersendjata guna menjelesaikan revolusi nasional-demokratis dalam menudju ke Sosialisme Indonesia.

Penerbit

Djakarta, Djuli 1964.

Sdr². Djenderal, para perwira pimpinan dan dosen SESKOAD, para perwira siswa SESKOAD.

Ini adalah untuk kedua kalinja, bahwa saja sebagai Ketua Comite Central Partai Komunis Indonesia dan sebagai Menteri Kordinator/Wakil Ketua MPRS, diminta untuk memberikan tjeramah dimuka SESKOAD. Sewaktu saja memberikan tjeramah untuk pertama kalinja dimuka SESKOAD, jaitu pada tgl. 29 Djuni 1963, saja mengatakan bahwa adanja tjeramah pemimpin kaum Komunis Indonesia dimuka anggota Angkatan Bersendjata RI „menandai tjiri jang chusus daripada keadaan politik dinegeri kita" dan bahwa tjiri jang chusus ini „membedakan kita, misalnja, dengan negeri² SEATO".

Selama masa satu tahun sedjak tjeramah itu, tjiri jang chusus daripada keadaan politik dinegeri kita telah semakin berkembang. Selama satu tahun itu, berbagai tradisi jang baik daripada perdjuangan revolusioner Rakjat Indonesia telah berkembang terus-menerus, jaitu tradisi berdjuang dan ber-konfrontasi dengan imperialisme, tradisi mempererat solidaritet Asia-Afrika dalam melawan musuh bersama Rakjat² sedunia, jaitu imperialisme AS, tradisi menggalang persatuan nasional revo-

lusioner antara seluruh kekuatan Rakjat Indonesia, tradisi anti-feodalisme, tradisi kerdjasama jang erat antara Angkatan Bersendjata RI dengan Rakjat Indonesia, djuga tradisi pemimpin² Komunis bertjeramah dimuka perwira² anggota Angkatan Bersendjata. Selama satu tahun ini saja djuga telah memberikan tjeramah² dihadapan perwira² ALRI dan AURI.

Dengan semakin berkembang tjiri² chusus, daripada perkembangan madju politik negeri kita, maka Indonesia mendjadi semakin berbeda dengan negeri² SEATO sehingga kedudukan kaum imperialis, terutama imperialis AS mendjadi makin gojah, bukan hanja di Indonesia tetapi djuga diseluruh Asia Tenggara. Keadaan politik di Indonesia memang baik sekali, dan ini tidak hanja membedakan Indonesia dari negeri² SEATO tetapi djuga ikut menggontjangkan SEATO itu sendiri. Indonesia telah membikin „horek" Asia Tenggara, sehingga kaum imperialis didaerah ini makin gotjang kedudukannja.

Saja mengutjapkan banjak terimakasih kepada pimpinan SESKOAD jang telah sekali lagi mengundang saja untuk bertjeramah disini. Ini sekali lagi merupakan sumbangan dalam memperkuat kerdjasama antara Angkatan Bersendjata RI, chususnja Angkatan Darat, dengan Rakjat Indonesia, chususnja dengan PKI. Mengapa Angkatan Bersendjata Republik Indonesia bisa bekerdjasama erat dengan Rakjat Indonesia, dengan kaum Komunis Indonesia? Hal ini didjelaskan dalam salah-satu kesimpulan daripada tjeramah saja dimuka SESKOAD pada tgl 29 Djuni tahun jl. jaitu mengenai tjiri² Angkatan Bersendjata RI, dimana saja dje askan tjiri jang pertama sbb : „Angkatan Bersendjata RI adalah anti-fasis, demokratis, anti-imperialis dan ber-tjita² Sosialisme Indonesia. Ia adalah alat untuk mengabdi Revolusi Indonesia, untuk mengubah masjarakat Indonesia dewasa ini mendjadi masjarakat Indonesia jang merdeka penuh dan demokratis sebagai landasan untuk menudju ke Sosialisme. Makajtu, ia mengabdi pada Rakjat berdjuang untuk Rakjat dan terdiri dari Rakjat. Untuk dapat melaksanakan tugas²nja Angkatan Bersendjata RI „jang djuga anggota Front Nasional berporoskan Nasakom, semestinja dipimpin oleh Program Bersama dari Revolusi Indonesia, jaitu Manipol dan pedoman² pelaksanaannja. Manipol adalah djuga doktrin Angkatan Bersendjata kita" (lihat D.N. Aidit: *PKI dan Angkatan Darat*, Jajasan „Pembaruan", Djakarta, 1963, hal. 41).

Saja telah diminta oleh pimpinan SESKOAD untuk membahas suatu tema jang saja anggap sangat menarik dan berguna, jaitu „*Sistim Penjelenggaraan Dukungan Masjarakat (Social Support) dan Pengawasan Masjarakat (Social Control) bagi Negara RI*". Tema ini adalah berguna untuk dibahas terutama karena, seperti halnja dengan berbagai istilah jang sudah mendjadi sebagian

daripada bahasa kita se-hari², istilah² „social support" dan „social control" sering sekali dipakai tetapi begitu sering tidak dimengerti. Mudah²an melalui pembahasan jang saja adjukan dalam tjeramah ini, kita akan mentjapai ber-sama² suatu pengertian jang tepat sebagai pegangan selandjutnja.

Adalah tepat pula apabila tema ini dibahas djuga oleh pemimpin² partai² politik lainnja, seperti jang sedang dilakukan didalam SESKOAD angkatan ini. Seperti akan saja djelaskan dalam tjeramah ini, masalah „social support" dan „social control" djustru adalah masalah partai² politik jang merupakan saluran² jang paling wadjar bagi kedua kegiatan ini.

Saja anggap bahwa membahas tema sematjam ini dimuka salahsatu Sekolah daripada Angkatan Bersendjata adalah sangat berguna dan menarik. Mengapa? Karena „social support" dan „social control" menjangkut satu hal jang sungguh vital, jaitu *hubungan antara Rakjat dengan Pemerintah, hubungan antara Rakjat dengan alat² negara, sedangkan Angkatan Bersendjata merupakan salahsatu bagian terpenting daripada alat² negara.* Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa dengan membahas masalah ini, kita sekaligus membahas pula sjarat² untuk memperkembangkan *Dwitunggal Rakjat dan Angkatan Bersendjata.* Pengertian jang tepat didalam Angkatan Bersendjata tentang „social support" dan „social control" merupakan sa-

lahsatu sjarat terpenting bagi Angkatan Bersendjata tersebut untuk dapat melakukan pengabdiannja kepada Rakjat dan Revolusi. Sebaliknja, pengertian jang keliru tentang hal² ini bisa merugikan kelandjutan Revolusi kita karena bisa menimbulkan kontradiksi² antara Rakjat dan Angkatan Bersendjata RI. Mengingat tjiri² daripada ABRI seperti telah saja kemukakan diatas, dan mengingat tjiri² Angkatan Bersendjata kita sebagai kaum tani bersendjata, maka seandainja kontradiksi² tsb. timbul, ini adalah sama halnja dengan timbulnja kontradiksi² didalam kalangan Rakjat sendiri, karena ABRI merupakan bagian jang takterpisahkan dari Rakjat Indonesia.

Kaum imperialis asing dan agen²nja didalamnegeri selalu berusaha keras untuk mengadu-domba Rakjat Indonesia dengan ABRI dan ABRI dengan Rakjat. Mereka selalu menggambarkan se-akan² terdapat permusuhan antara kaum Komunis Indonesia dengan ABRI karena kepentingan² kaum imperialis memang membutuhkan adanja permusuhan jang demikian. Mereka tahu benar, bahwa dengan menimbulkan permusuhan jang demikian mereka akan bisa mengalihkan perdjuangan Rakjat Indonesia dari sasaran jang tepat, jaitu kaum imperialis. Karena inilah kaum Komunis selalu mendjundjung tinggi sembojan „Dwitunggal Rakjat dan Angkatan Bersendjata". Biarlah kaum imperialis berilusi tentang perseteruan antara ABRI dengan PKI, asal kita sendiri tidak mempunjai

fikiran jang demikian. Ada baiknja musuh² kita berfikiran keliru tentang kita.

Pimpinan SESKOAD telah meminta saja supaja membahas lima aspek masalah „social support" dan „social control", jaitu (a) faktor² jang mendjadi pertimbangan dalam menentukan „social support" dan „social control", (b) bagaimana tentang filsafah, struktur dan pelaksanaannja. (c) hal² jang diperlukan untuk mensukseskan pelaksanaannja, (d) pengaruhnja terhadap kelantjaran dan kehidupan negara kita, dan (e) bagaimana tentang perkembangannja dalam waktu dekat ini. Dalam berusaha memenuhi permintaan ini saja akan membagi tjeramah ini dalam tiga bagian pokok, jaitu: *pertama*, masalah revolusi dan kekuasaan negara dalam hubungannja dengan „social support" serta „social control", *kedua*, kekuasaan negara RI sekarang dan tugas² chusus „social support" serta „social control" dewasa ini, *ketiga*, sjarat² pelaksanaan „social support" dan „social control", dan *keempat*, sembojan PKI „Tripandji Bangsa untuk Demokrasi, Persatuan dan Mobilisasi".

1

Masalah Revolusi dan Kekuasaan Negara Dalam Hubungannja dengan „Social Support" dan „Social Control"

Seperti sudah saja katakan dalam kata pengantar saja tadi, masalah „social support" dan „social control" menjangkut masalah hubungan antara Rakjat dengan negara, antara Rakjat dengan Pemerintah jang memimpin negara. Oleh karena itu pembahasan ini perlu dimulai dengan uraian tentang masalah negara itu sendiri. Dan karena masalah negara tak mungkin dibahas setjara abstrak tetapi harus dibahas setjara kongkrit, artinja dalam keadaan kongkrit di Indonesia dan dalam hubungannja dengan Revolusi Indonesia, maka pembahasan masalah negara harus dipadukan dengan pembahasan soal² pokok Revolusi Indonesia.

Per-tama² kita harus mendjawab pertanjaan, apakah negara itu? Pertanjaan ini telah dibahas dalam salahsatu kuliah Presiden Sukarno tentang „Pantjasila Sebagai Dasar Negara", jaitu kuliah jang kedua jang diutjapkan oleh Bung Karno dalam kursus jang diberikan oleh beliau di Istana Negara dalam tahun 1958. Oleh Bung Karno,

pertanjaan itu didjawab dengan mengutip Karl Marx, bahwa „Negara adalah satu machtsorganitie ..... bahkan ..... satu machtsorganisatie daripada sesuatu klas untuk mempertahankan dirinja terhadap lain klas". (Lihat Presiden Sukarno, *Tjamkan Pantja Sila!* dikeluarkan oleh Panitia Nasional Peringatan Lahirnja Pantja Sila, hal. 71).

Selandjutnja dalam kuliah Presiden Sukarno jang ketiga tentang „Pantjasila Sebagai Dasar Negara" didjelaskan lebih landjut bahwa „kita mempergunakan negara ini sebagai alat untuk mengubah susunan masjarakat, untuk merealisasi satu „masjarakat jang adil dan makmur". Djuga dikatakan oleh Bung Karno dalam kuliah itu: „Negara adalah satu machtsorganisatie, negara adalah satu alat. Nah, alat ini kita gerakkan. Keluar, untuk menentang musuh jang hendak menjerang kita, menentang intervensi, menentang peperangan, menentang apa sadja dari luar. Kedalam, negara ini djuga kita pakai untuk memberantas segala penjakit[2] didalam pagar, tapi djuga untuk merealisasi tjita[2] kita akan masjarakat adil dan makmur". (Lihat Presiden Sukarno: *Tjamkan Pantja Sila!* hal. 115 dan 116).

Penggunaan adjaran Marx oleh Bung Karno sebagai dasar untuk menerangkan masalah negara adalah wadjar, karena adjaran[2] Marx memang merupakan sumber daripada teori revolusioner tentang negara, kekuasaan negara dan hubungannja dengan masalah revolusi.

Pembahasan tentang adjaran Marx mengenai masalah Negara telah dilakukan oleh W.I. Lenin setjara mendalam dalam bukunja *Negara dan Revolusi* dimana oleh Lenin disimpulkan bahwa negara „adalah sesuatu kekuasaan represif jang chusus" suatu „kekuatan chusus untuk menghantam klas jang ditindas" (lihat *State and Revolution*, Foreign Languages Publishing House, Moscow, hal. 29 dan 31).

Selandjutnja dalam buku ini, jang ditulis dalam bulan Agustus 1917, Lenin membahas masalah negara dalam hubungannja dengan revolusi proletar jang berlangsung di Rusia dalam tahun 1917, dan melandjutkan pembahasannja dengan pertanjaan, sbb: „Klas jang mana jang harus dihantam oleh kaum proletar?". Bagi Indonesia, pertanjaan jang amat penting ini bisa diterdjemahkan sbb: „Klas[2] jang mana jang harus dihantam oleh Rakjat Indonesia?" Bagi Indonesia jang sedang melangsungkan revolusi anti-imperialis, maka Bung Karno setelah dengan tepat mengatakan bahwa „suatu revolusi ditentukan oleh keadaan objektif daripada apa jang dihantam oleh revolusi dan daripada apa jang menghantam" (lihat *Tjamkan Pantja Sila!* hal. 41), kemudian menundjukkan bahwa revolusi di Indonesia berarti „menumbangkan imperialisme" dan bahwa: „Revolusioner adalah tiap[2] orang jang menentang imperialisme" (*Tjamkan Pantja Sila!* hal. 63). Djadi djelaslah bahwa dalam Revolusi Indonesia, negara sebagai alat harus di-

pergunakan untuk menghantam klas² jang mewakili dan membela kepentingan² kaum imperialis.

Dalam salahsatu dokumen resmi Republik kita, jaitu didalam *Deklarasi Ekonomi* (Dekon), kita memperoleh gambaran jang lebih lengkap tentang tugas represif revolusi Indonesia pada dewasa ini, jaitu kewadjiban untuk „mengkikis habis sisa² imperialisme dan sisa² feodalisme" dan karena ini merupakan „apa jang dihantam" oleh revolusi Indonesia, maka sifat revolusi kita pada tahap sekarang adalah „revolusi nasional dan demokratis", nasional karena anti-imperialis, dan demokratis karena anti-feodal. Anti-feodal disini djanganlah diartikan anti-ningrat atau anti-Raden Mas, tetapi anti sistim politik dan ekonomi jang berlandaskan pemilikan tuantanah atas tanah.

Semuanja ini berarti, bahwa dalam Revolusi Indonesia, negara sebagai „kekuatan represif jang chusus" atau „machtsorganisatie" mempunjai tugas untuk menghantam imperialisme dan feodalisme dan dengan demikian negara mendjadi alat daripada semua golongan Rakjat jang anti-imperialis dan anti-feodal, atau seperti dikatakan dalam Manipol „konsentrasi kekuatan nasional", jaitu „kekuatan seluruh Rakjat Indonesia, kekuatan seluruh bangsa jang menentang imperialisme-kolonialisme". Menentang imperialisme-kolonialisme tidak bisa berarti lain bahwa djuga harus menentang feodalisme, karena *feodalisme adalah dasar sosial daripada imperialisme*, dan *kolonialisme adalah perpaduan daripada sistim politik dan ekonomi imperialis dengan sistim politik dan ekonomi feodal.* Dan kalau kita berbitjara tentang kekuatan revolusi Indonesia menurut Manipol, tak boleh kita lupakan apa jang dikatakan oleh Manipol mengenai kaum buruh dan kaum tani sebagai „kekuatan pokok dalam Revolusi" dan sebagai „soko-guru" revolusi (*Tubapi*, hal. 82).

Mengingat hal² ini dapat disimpulkan, bahwa tugas Revolusi Indonesia jalah mendirikan negara jang merupakan alat dalam tangan „seluruh Rakjat Indonesia ..... jang menentang imperialisme-kolonialisme". Sifat negara jang demikian tentunja sangat berbeda dengan negara kolonial dan feodal atau setengah-feodal jang djustru merupakan alat dalam tangan kaum imperialis dan kaum feodal dan klas² jang meladeni kepentingan²nja, jang merupakan alat untuk menindas atau menghantam seluruh Rakjat. Disinilah bedanja antara apa jang dikatakan oleh Lenin sebagai sesuatu negara tipe lama, jaitu „sesuatu mesin negara, aparat dan organ administrasi ..... (dengan) tentara tetap, polisi tetap dan birokrasi tetap jang ..... punja hak istimewa dan berdiri *diatas* Rakjat" dengan suatu negara tipe baru dimana „Rakjat ..... atas kemauan mereka sendiri sedang mentjiptakan demokrasi *menurut tjara mereka sendiri*".

Revolusi dalam zaman manapun selalu membawa perubahan dalam kekuasaan negara. *Djustru perubahan kekuasaan negara itulah jang menentukan*

sifat sesuatu revolusi, karena seperti dikatakan oleh Bung Karno ,,kita mempergunakan negara ini sebagai alat untuk mengubah susunan masjarakat", sedangkan kalau kekuasaan negara belum diubah sehingga sepenuhnja mewakili klas² jang revolusioner, tak mungkinlah untuk menggunakan negara sebagai alat untuk melakukan tugasnja jang revolusioner itu, jaitu ,,mengubah susunan masjarakat".

Tetapi revolusi² dalam sedjarah manusia sampai kepada revolusi burdjuis melawan feodalisme hanja menggantikan bentuk² penghisapan, misalnja dari penghisapan setjara feodal mendjadi setjara kapitalis. Revolusi² itu tidak melenjapkan penghisapan dan hanja menggantikan kekuasaaan suatu klas minoritet jang satu dengan klas minoritet jang lain, jang tetap menggunakan negara sebagai alat untuk ,,menghantam" majoritet Rakjat jang ditindas.

Revolusi Indonesia merupakan revolusi anti-imperialis dan anti-feodal dan berperspektif Sosialisme. Artinja, bahwa revolusi Indonesia, setelah melaksanakan tugas² anti-imperialis dan anti-feodalnja, harus dilandjutkan untuk mewudjudkan masjarakat adil dan makmur, masjarakat jang bebas dari ,,l'exploitation de l'homme par l'homme" atau masjarakat Sosialis Indonesia. Maka revolusi Indonesia tidak boleh mendirikan kekuasaan dari klas minoritet, tapi mempunjai tugas untuk mendirikan kekuasaan dari majoritet penduduk, atau menurut kata² Manipol ,,seluruh Rakjat jang menentang imperialisme-kolonialisme" untuk mengikis habis klas² jang hanja meliputi minoritet, jaitu klas² jang mewakili atau membela kepentingan² imperialis dan feodal, atau setjara kongkrit, kaum imperialis, kaum feodal, kaum kapitalis komprador dan kaum kapitalis birokrat. Dalam pidato Bung Karno ,,Lahirnja Pantjasila" pada tgl 1 Djuni 1945, tentang ini dikatakan, bahwa Rakjat Indonesia harus mendirikan ,,negara Gotongrojong".

Dalam negara² jang mewakili klas² minoritet untuk menindas Rakjat banjak, tetap terdapat pertentangan hebat antara kekuasaan negara dengan Rakjat banjak. Tetapi tugas Revolusi Indonesia jalah untuk mendirikan negara jang mewakili dan mèntjerminkan kepentingan² Rakjat banjak. Dalam rangka inilah dapat kita membitjarakan masalah ,,social support" (dukungan masjarakat) dan ,,social control" (pengawasan masjarakat) bahkan perlu dilengkapi dengan ,,social participation" (pengikutsertaan masjarakat). Memang dukungan masjarakat, pengawasan masjarakat dan pengikutsertaan masjarakat dalam arti dukungan, pengawasan dan pengikutsertaan majoritet Rakjat, hanja mungkin ditjapai dalam rangka mendirikan negara jang mewakili kepentingan² Rakjat banjak, dalam rangka pelaksanaan revolusi dari Rakjat banjak. Dan harus dinjatakan pula bahwa *mendirikan negara jang mewakili Rakjat banjak hanjalah mungkin dengan adanja dukungan, pengawasan dan pengikutsertaan masjarakat.*

Dengan pendjelasan ini, dapatlah difahami bahwa „social support" dan „social control" tidak mempunjai arti apapun djika tidak dibahas dalam hubungannja dengan sesuatu revolusi sematjam Revolusi Indonesia. Dalam negara jang bersifat kolonial ataupun jang bersifat imperialis dan kapitalis, istilah „social support" dan „social control" tidak mempunjai arti apapun ketjuali sebagai hiasan untuk tipuan belaka. Kekuasaan negara jang demikian tak mungkin memperoleh „social support" jang sungguh², karena ia hanja mewakili kepentingan² klas minoritet. Djuga fungsi pengawasan hanja dilakukan oleh klas jang diwakili kepentingan²nja untuk mendjaga supaja kekuasaan negara atau pemerintah selalu berbuat sesuai dengan kepentingan² klas tsb. Bagi Rakjat banjak dalam negeri sematjam itu tentu tidak ada masalah „social support", pun „social control". Jang ada jalah „social opposition" atau „perlawanan masjarakat" jang achirnja akan mentjetus dalam revolusi untuk menggantikan kekuasaan jang ada dan mendirikan kekuasaan dari majoritet.

Dengan pendjelasan ini dapat kita lihat pula, bahwa fungsi² dukungan dan pengawasan ke-dua²-nja merupakan fungsi jang dilakukan oleh klas² jang kepentingan²nja diwakili oleh negara jang bersangkutan, dan oleh karena itu, dua fungsi tsb merupakan suatu kesatuan jang bulat, jang tak ter-pisah²kan satu dengan jang lain. *Jang didukung harus bisa diawasi, karena djika tidak, dukungan*

tak akan bisa dimobilisasi, sedangkan pengawasan merupakan sikap jang positif jang hanja mungkin dilakukan terhadap sesuatu jang didukung. Djika jang didukung tidak bisa diawasi dapat terdjadi bahwa dukungan akan disalahgunakan, ditipu dan dichianati, akan merupakan penipuan dan pengchianatan. Disinilah letaknja kebohongan daripada dalih² sementara orang jang takut akan pengawasan Rakjat dan oleh karenanja suka mengatakan bahwa jang harus diutamakan jalah „social support" dan bukan „social control". Ini tidak lain merupakan akal bulus untuk memaksa Rakjat memberikan dukungannja tanpa melakukan pengawasannja. Tidaklah mengherankan djika djustru kaum kapitalis birokrat jang mengadjak Rakjat untuk „mengutamakan dukungan", apalagi dalam keadaan seperti dewasa ini dimana Rakjat semakin tadjam melakukan pengawasannja, terutama dalam menuntut rituling semua oknum² kontra-revolusioner, termasuk kaum kapitalis birokrat sendiri.

Satu hal jang perlu ditekankan dalam rangka membahas „social support" dan „social control" jalah, bahwa karena revolusi Indonesia merupakan revolusi daripada Rakjat banjak, revolusi seluruh kekuatan nasional, maka persatuan nasional merupakan kebutuhan mutlak dalam perdjuangan Rakjat Indonesia untuk memenangkan revolusinja. „Social support" dan „social control" mempunjai peranan jang penting sekali bukan hanja dalam mendukung dan mengawasi kekuasaan negara, te-

tapi djuga dalam terus-menerus memupuk persatuan nasional. Kaum Komunis sepenuhnja berdiri dibelakang Bung Karno jang sedjak dahulu selalu mentjurahkan segenap tenaganja pada tugas jang mulia dalam memupuk dan memperkuat persatuan nasional. Kaum Komunis Indonesia menjetudjui dan menjambut hangat seruan Bung Karno tahun jang lalu di Purwokerto agar setiap golongan dan partai politik ber-lomba² dalam memperdjuangkan pelaksanaan konsekwen daripada program bersama Rakjat Indonesia, jaitu Manipol. PKI tidak hanja menjetudjui, tetapi ikut setjara aktif dalam kompetisi ini.

Hal ini perlu difahami setjara mendalam, karena „social support" dan „social control" perlu dilaksanakan setjara bekerdjasama dan setjara berlomba atau berkompetisi Manipolis, dan tidak setjara bermusuh²an antara kekuatan² revolusioner. Perlombaan Manipolis berarti perlombaan antara partai² politik untuk paling banjak memobilisasi „social support" dan „social control", semuanja dengan satu tudjuan, jaitu pelaksanaan Manipol, program bersama seluruh Rakjat Indonesia. Kekuatan² Rakjat Indonesia, jaitu semua klas revolusioner, jang diwakili oleh partai² politik mereka masing², harus berbuat apa sadja untuk menggalang persatuan nasional guna menjelesaikan revolusi Indonesia. Dalam pengertian inilah, klas buruh Indonesia dengan partainja, PKI, bersedia meletakkan kepentingan nasional diatas kepentingan klas.

Mengenai hal persatuan nasional dalam hubungannja dengan teori tentang revolusi Indonesia, kaum Komunis Indonesia telah berhasil menjusun suatu rumusan jang sederhana, dengan maksud untuk memperkokoh pengertian tentang mutlak perlunja persatuan nasional sambil menundjukkan dengan djelas komposisi klas dan hubungan masing² klas dalam persatuan nasional itu. Rumusan ini dinjatakan dalam lima kata sadja, dalam lima kata jang gampang sekali diingat oleh siapapun, jaitu: *do, do, re, mi, fa (1, 1, 2; 3, 4)*.

Do (1) jang pertama berarti *satu* kekuatan pelopor revolusi Indonesia jaitu klas proletar. Klas ini mendjadi pelopor karena ia paling konsekwen dalam menentang imperialisme dan feodalisme, karena ia klas jang paling revolusioner, klas jang paling berkepentingan akan tertjapainja Sosialisme, klas jang paling mampu dalam memperdjuangkan teori revolusioner untuk terus-menerus membimbing revolusi. Dalam tulisannja *„Marhaen dan proletar"* Bung Karno djuga berkata bahwa „barisan pelopor kita adalah barisannja kaum buruh, barisannja kaum proletar" *(Dibawah Bendera Revolusi,* hal. 256).

Do (1) jang kedua berarti *satu* kekuatan pokok, jaitu kaum tani. Kaum tani merupakan kekuatan pokok revolusi karena hakekat revolusi Indonesia jalah revolusi agraria jang mempunjai tugas melaksanakan perubahan² agraria dan menghapuskan penindasan serta penghisapan feodal. Kaum

tani meliputi bagian terbesar daripada penduduk Indonesia dan selama bagian jang terbesar itu belum bangkit dan ikut dalam revolusi, tidaklah mungkin untuk memenangkan revolusi kita.

Re (2) berarti *dua* kekuatan jang mendjadi basis persatuan nasional, jaitu persekutuan kaum buruh dan kaum tani. Persatuan nasional Rakjat Indonesia hanja bisa kokoh djika persekutuan antara dua kekuatan ini adalah kuat dan tak-tergojahkan.

Mi (3) berarti *tiga* kekuatan pendorong revolusi, jaitu kaum buruh, kaum tani dan burdjuasi ketjil jang semuanja itu adalah Rakjat pekerdja, Rakjat jang tidak melakukan penghisapan terhadap orang lain dan jang oleh karenanja bisa mendjadi pendorong terus-menerus bagi revolusi jang perspektifnja jalah penghapusan penghisapan atas manusia oleh manusia.

Fa (4) berarti *empat* kekuatan front nasional, jaitu kaum buruh, kaum tani, burdjuasi ketjil dan burdjuasi nasional. Empat kekuatan nasional ini mempunjai kepentingan jang sama, jaitu menumpas imperialisme dan feodalisme karena mereka semua menderita karena penindasan dan penghisapan imperialisme dan feodalisme. Merekalah „seluruh Rakjat Indonesia ..... jang menentang imperialisme-kolonialisme" atau jang harus merupakan „samenbundeling van alle revolutionaire krachten".

Disamping rumusan itu, jang mendjelaskan kom-

posisi klas daripada kekuatan revolusi Indonesia dan saling hubungannja dalam front persatuan nasional, perlu djuga dikemukakan peranan gagasan Nasakom dalam menggalang front persatuan nasional dinegeri kita. Gagasan Nasakom merumuskan aliran² terpenting dalam masjarakat Indonesia jang perlu dihimpun, jaitu aliran nasionalis, aliran agama dan aliran komunis sebagai kenjataan² jang hidup dikalangan Rakjat Indonesia. Gagasan Nasakom telah lahir sedjak tahun 1926, jaitu dengan adanja tulisan Bung Karno jang sudah terkenal, jaitu „*Nasionalisme, Islamisme* dan *Marxisme*" jang untuk pertama kalinja mentjetuskan ide kerdjasama antara aliran² tersebut. Sedjak saat itu, semua tulisan Bung Karno, semua pidatonja dan djuga semua kegiatan²nja ditudjukan kepada tugas besar kita bersama, jaitu menggalang dan terus-menerus memperkuat persatuan nasional.

Adalah mendjadi kejakinan kaum Komunis Indonesia bahwa gagasan persatuan Nasakom jang dikembangkan oleh Bung Karno sedjak tahun 1926 itu bukan hanja mempunjai arti nasional tetapi djuga mempunjai arti internasional, terutama bagi nasion² tertindas jang sedang melakukan perdjuangan revolusioner melawan imperialisme, karena salahsatu djimat bagi setiap nasion tertindas untuk melawan imperialisme jalah persatuan nasional revolusioner.

Didalam tulisan Bung Karno jang terkenal itu, dikatakan sbb: „*Mempeladjari, mentjahari hubu-*

ngan antara ketiga sifat itu (Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme, DNA), *membuktikan, bahwa tiga haluan ini dalam suatu negeri djadjahan tak guna berseteruan satu sama lain, membuktikan pula, bahwa ketiga gelombang ini bisa bekerdja bersama-sama mendjadi s a t u gelombang jang mahabesar dan maha-kuat, s a t u ombak-taufan jang tak dapat ditahan terdjangnja, itulah kewadjiban jang kita semua harus memikulnja." (Dibawah Bendera Revolusi,* hal. 2).

Demikian tugas jang dipikul oleh Bung Karno sedjak tahun 1926, jaitu hampir 40 tahun jang lalu, tugas jang dilakukan beliau sampai saat ini. Salahsatu usaha terpenting dari Bung Karno dalam memperkokoh gagasan Nasakom sebagai poros daripada persatuan nasional jalah pidato „Lahirnja Pantjasila" dalam bulan Djuni 1945 jang menegaskan bahwa djika Pantjasila diperas mendjadi satu maka hasilnja jalah gotong-rojong, sedangkan hakekat daripada gotong-rojong telah ditegaskan oleh Bung Karno dalam pidatonja tentang Konsepsi Presiden dalam bulan Februari 1957 dimana gotong-rojong didjelaskan sebagai „samenbundeling van alle revolutionaire krachten".

Gagasan Bung Karno jang ditulis hampir 40 tahun jl tetap mendjadi gagasan jang segar, jang tjotjok, jang harus mendjadi pedoman untuk setiap patriot Indonesia dalam menggalang front persatuan nasional. Melakukan tugas „social support" dan „social control" harus beranti sekaligus

melaksanakan tugas seperti dirumuskan hampir 40 tahun jl oleh Bung Karno, karena hanja dengan melaksanakan tugas itu, kita dapat memadjukan dan merealisasi fungsi² „social support", „social control" dan „social participation".

2

Kekuasaan Negara di Indonesia Sekarang dan Tugas² Chusus „Social Support" serta „Social Control" Dewasa ini

Setelah mendjelaskan masalah kekuasaan negara dalam sesuatu revolusi pada umumnja dan masalah kekuasaan negara dalam revolusi Indonesia chususnja, saja ingin sekarang mengemukakan pandangan kaum Komunis tentang kekuasaan negara dinegeri kita pada dewasa ini dan tugas² chusus „social support" dan „social control" dalam hubungan dengan masalah ini.

Sudah mendjadi suatu pengertian umum bahwa revolusi Indonesia belum selesai, tetapi mengenai rumusan inipun dibutuhkan suatu pembahasan jang lebih mendalam untuk benar² bisa memahami maknanja. Kalau revolusi Indonesia belum selesai maka adalah wadjar bila kita menanjakan: „Djadi, kita sudah sampai dimana dalam menjelesaikan Revolusi kita itu?". Dalam mendjawab pertanjaan itu, kita harus per-tama² menekankan kepada hal jang sangat penting, jaitu bahwa Revolusi Indonesia terdiri dari dua tahap. Manipol menegaskan tentang adanja dua tahap revolusi kita. Deklarasi

Ekonomi djuga menegaskan tentang adanja dua tahap sbb: „..... dalam *tahap pertama* kita harus mentjiptakan susunan ekonomi jang bersifat nasional dan demokratis, jang bersih dari sisa² imperialisme dan bersih dari sisa² feodalisme. Tahap pertama adalah persiapan untuk tahap kedua, jaitu tahap ekonomi Sosialis Indonesia, ekonomi tanpa penghisapan manusia oleh manusia, tanpa 'l'exploitation de l'homme par l'homme'." (*Dekon*, fasal 3). Selandjutnja dikatakan: „Kita sekarang sedang berada dalam tahap pertama Revolusi kita. Kewadjiban kita dibidang ekonomi dalam tahap ini jalah mengikis habis sisa² imperialisme dan sisa² feodalisme dibidang ekonomi, menggerakkan semua potensi nasional untuk meletakkan dasar dan mempertumbuhkan suatu ekonomi nasional jang bebas dari imperialisme dan feodalisme sebagai landasan menudju kemasjarakat Sosialis Indonesia". (*Dekon*, fasal 4).

Dalam pidato Gesuri, tgl. 17 Agustus 1963, Presiden Sukarno dengan lebih tegas lagi mengatakan, bahwa „Dengan adanja Dekon, orang tidak diperkenankan lagi mengkisruhkan dua tahap revolusi. ..... Disatu fihak tidak ditolerir pendapat jang menjangkal, bahwa haridepan kita adalah sosialisme ..... Difihak lain, tidak ditolerir pendapat bahwa sosialisme bisa diselenggarakan 'satu kali pukul' ..... tanpa menjelesaikan *lebih dulu* perdjuangan nasionalis-demokratis, jaitu tanpa menghabis-tamatkan lebih dahulu sisa² imperialisme dan

feodalisme. Dekon mengatakan hal ini dengan djelas dan tegas! Karena itu saja pun sering sekali menandaskan bahwa kita sekarang belum berada dalam alam sosialisme". (lihat *Gesuri* penerbitan chusus Departemen Penerangan no. 280, hal. 32 dan 33).

Kutipan[2] ini menegaskan dengan djelas, bahwa bukan hanja revolusi kita jang harus melalui dua tahap itu belum selesai, tetapi malahan tahap pertamapun belum selesai. Penegasan ini sungguh penting sekali untuk dapat menentukan taktik perdjuangan kita, untuk mengetahui dan menetapkan dengan djelas musuh[2] revolusi kita pada saat ini. Pradjurit dimanapun akan dapat memahami bahwa pertempuran tak dapat dilakukan djika sebelumnja tidak djelas siapa[2] musuh[2]nja. Sama djuga halnja dengan suatu revolusi. Jang harus djelas lebih dahulu jalah siapa[2] musuh[2]nja „siapa jang harus dihantam" untuk menggunakan kata[2] Bung Karno. Disini antara lain letaknja sifat ilmiah daripada Manipol serta Dekon jang lebih memperintjikan persoalannja, jaitu menegaskan dengan tidak ragu[2] bahwa musuh[2] Revolusi Indonesia pada tahap sekarang jang belum selesai itu jalah imperialisme dan feodalisme.

Kalau Dekon sampai kepada kesimpulan jang demikian, jaitu bahwa pun tahap pentama revolusi belum selesai, ini membutuhkan dari kita suatu pengertian tentang hal jang penting sekali, jaitu mengapa sampai sekarang tahap ini belum bisa

diselesaikan ? Seperti sudah saja kutip diatas, Bung Karno telah mendjelaskan negara sebagai alat untuk menghantam apa jang harus dihantam oleh revolusi dan untuk menjusun masjarakat baru. Kenjataan bahwa tugas ini belum selesai menundjukkan bahwa negara kita sendiri, atau lebih tepatnja kekuasaan negara, belum sepenuhnja sesuai dengan tugas jang harus dilakukannja dalam tahap pertama ini, tahap anti-imperialis dan anti-feodal, tahap nasional dan demokratis. Djadi, persoalannja jalah: *penjesuaian kekuasaan negara dengan tugas[2] revolusi, penjesuaian tugas dan tudjuan dengan alat.*

Kenjataan menundjukkan bahwa pada kekuasaan negara dinegeri kita masih terdapat dua segi, segi jang pro-Rakjat dan segi jang anti-Rakjat. Segi pro-Rakjatnja melakukan perdjuangan sesuai dengan tugas[2] revolusi kita pada tahap sekarang, jaitu mengganjang musuh[2] revolusi kita sesuai dengan apa jang dikatakan didalam Manipol dan Dekon. Tetapi segi anti-Rakjatnja menentang perdjuangan ini dan dengan berbagai dalih serta kegiatan selalu menghambat penjelesaian tugas[2] revolusi kita. Adanja dua segi berarti bahwa negara belum bisa digunakan sepenuhnja sebagai alat untuk menghantam musuh[2] revolusi. Analisa ini membantu kita untuk mengerti mengapa revolusi kita belum selesai, dan ia djuga membantu kita dalam memahami mengapa masalah kekuasaan negara adalah sedemikian penting dalam menjelesai-

kan suatu revolusi. Pengalaman revolusi Indonesia sendiri membuktikan bahwa *selama kekuasaan negara belum sepenuhnja sesuai dengan tugas dan tudjuan revolusi*, memang tak mungkin negara akan bisa dipakai sebagai ..alat untuk mengubah susunan masjarakat".

Dalam keadaan jang demikian, maka ,,social support" dan ,,social control" jang dilakukan oleh Rakjat Indonesia pada dewasa ini mempunjai suatu tugas jang chusus, jaitu untuk memberikan dukungan dan dorongan penuh kepada segi pro-Rakjat, dan untuk menundjuk, mengawasi dan mengachiri segi anti-Rakjat. Hal ini mutlak perlu dilakukan djika tahap pertama revolusi kita mau diselesaikan. Karena itu, bisa dikatakan, bahwa melalui ,,social support" dan ,,social control" Rakjat Indonesia berdjuang untuk menjelesaikan revolusinja.

Mengapa bisa dikatakan bahwa pada kekuasaan negara dinegeri kita terdapat dua segi? Mari kita mengambil beberapa tjontoh jang sederhana.

Salahsatu tugas pokok revolusi kita jalah menghantam atau mengikis habis sisa² feodalisme. Dinegeri kita sisa² feodalisme berbentuk pemilikan tanah oleh tuantanah² jang menggunakan tanah itu sebagai alat penghisapan melalui sewa tanah, disamping berbagai bentuk penghisapan lain, seperti idjon, lintahdarat, tengkulak² jang memonopoli hasil bumi kaum tani, dsb. Sisa² feodalisme ini hanja dapat diachiri melalui landreform jang radikal.

Tentang hal ini, oleh Presiden Sukarno dikatakan dalam pidato *Djarek*, 17 Agustus 1960 sbb: ,,Revolusi Indonesia tanpa landreform adalah sama sadja dengan gedung tanpa alas, sama sadja dengan puhun tanpa batang, sama sadja dengan omong-besar tanpa isi. Melaksanakan landreform berarti melaksanakan *satu bagian jang mutlak dari Revolusi Indonesia*. ..... tanah tidak boleh mendjadi alat penghisapan ..... Tanah untuk Tani! Tanah untuk mereka jang betul² menggarap tanah! Tanah tidak untuk mereka jang dengan duduk ongkang² mendjadi gemuk-gendut karena menghisap keringatnja orang² jang disuruh menggarap tanah itu!" (lihat *Tubapi*, hal. 223-224). Dari uraian Presiden Sukarno ini mendjadi gamblang definisi daripada tuantanah, jaitu *orang jang ongkang² tidak bekerdja, hidup dari menghisap keringat orang² jang disuruh menggarap tanahnja.*

Apa jang telah dibuat mengenai tugas ini? Berkat adanja segi pro-Rakjat, jang dengan kuat didukung oleh kekuatan² progresif, terutama oleh gerakan tani jang meningkat dan wakil² gerakan tani dan Rakjat pekerdja lainnja dalam Parlemen, maka telah diundangkanlah suatu undang², jaitu Undang² Pokok Agraria (UUPA). Undang² ini belum bisa dikatakan mengikis habis sisa² feodal karena masih memungkinkan adanja pemilikan tanah oleh tuantanah². Dibeberapa daerah UUPA malahan bisa melegalkan dan menambah djumlah tuantanah seperti di-tanah² bekas pemilikan komu-

nal. Bung Karno pernah mengatakan setjara tepat bahwa landreform berdasarkan UUPA merupakan tindakan dalam rangka usaha² „mengachiri penghisapan feodal setjara ber-angsur²". („Djarek", lihat *Tubapi*, hal. 224). Disamping UUPA, djuga sudah diadakan Undang² Perdjandjian Bagi Hasil (UUPBH) jang sedikit membatasi penghisapan feodal dengan menetapkan bahwa bagian daripada hasil tanah jang diserahkan oleh penggarap kepada pemilik tanah tidak lebih daripada 50 persen hasil bersih, artinja setelah dipotong ongkos² produksi jang dikeluarkan oleh penggarap. Tentang undang² ini, Bung Karno pernah mengatakan dengan tepat bahwa ia „agak menguntungkan kaum tani" (*Takem*. Dep. Penerangan Penerbitan Chusus no. 225, hal. 39).

Kedua undang² ini dengan demikian dapat mengurangi sisa² feodalisme atau mengurangi penghisapan dan kekuasaan tuantanah dan oleh karenanja bisa dikatakan progresif. Tetapi undang² jang meskipun masih bersifat terbatas ini ternjata pelaksanaannja berdjalan „seperti keong", untuk memindjam kata² Bung Karno. Bahkan seperti keongpun tidak, karena betapapun perlahan²nja, keong toh bisa berdjalan madju, sedangkan pelaksanaan UUPA matjet samasekali atau malahan mundur dalam arti dilaksanakan menjeleweng. Djadi keong masih mendingan!

Baru² ini, selama bulan Februari, Maret, April dan Mei saja sendiri telah memimpin suatu gerakan riset jang meliputi seluruh pulau Djawa, dan dalam riset itu telah diselidiki keadaan didalam desa² di 124 ketjamatan di Djawa jaitu 24 ketjamatan di Djawa Barat, 30 ketjamatan di Djawa Tengah dan 70 ketjamatan di Djawa Timur. Kalau saja tidak salah, ini merupakan pekerdjaan riset jang paling luas jang pernah dilakukan dinegeri kita. Di-mana² saja telah menemukan fakta² jang sepenuhnja membenarkan kritik tadjam jang pernah dikeluarkan oleh Bung Karno mengenai pelaksanaan kedua undang² itu.

Walaupun Pemerintah telah menjusun berbagai rentjana, walaupun berbagai keputusan, instruksi dan matjam² lagi telah dikeluarkan dan dikirimkan kepada instansi² di-daerah², namun kenjataannja masih tetap sama, pelaksanaan kedua Undang² itu masih belum berdjalan sebagaimana mestinja, sehingga perlu diadakan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria no. 4/1964 jang memuat sanksi² terhadap tuantanah jang tidak melaksanakan UUPBH. Sekalipun sudah demikian, djuga belum berdjalan pelaksanaan undang² tsb. Bukankah ini membuktikan tentang adanja dua segi dalam kekuasaan negara? Jaitu segi pro-Rakjat jang bisa menggolkan undang² jang agak progresif, tetapi segi anti-Rakjat jang meng-halang²i pelaksanaannja.

Didalam riset jang telah saja pimpin itu, saja telah memperoleh banjak sekali fakta² jang menundjukkan, bahwa kaum tani Djawa sudah meng-

ambil sikap jang sangat tepat, jaitu sikap jang sepenuhnja sesuai dengan sifat mereka sebagai „soko-guru revolusi" seperti dikatakan dalam Manipol, sebagai kekuatan pokok revolusi, dan dengan bertekad melakukan aksi² sefihak untuk melaksanakan-undang² itu. Aksi² sefihak adalah sepenuhnja sah karena tudjuannja jalah untuk melaksanakan undang² jang telah dibuat oleh Parlemen dan untuk berlakunja ditandatangani oleh Presiden jang menurut ketentuan Menteri Pertanian dan Agraria sendiri harus sudah selesai di Djawa dalam tahun 1963. Sekarang sudah tahun 1964, dan kalau kaum tani tidak melakukan aksi sefihak tidak akan ada realisasi daripada undang² tsb. Aksi² sefihak itu adalah sepenuhnja sesuai dengan tudjuan revolusi kita karena dilakukan dengan mendjundjung tinggi sembojan *„tiga-untung"* jaitu untung bagi Pemerintah, untung bagi kaum tani, untung bagi revolusi. *Untung bagi Pemerintah,* karena kaum tani sudah tidak lagi mau setor sebagian daripada hasil tanahlebih jang belum di UUPA-kan kepada tuantanah tetapi hanja mau setor kepada Pemerintah, sedangkan mengenai tanah garapan dibawah batas maximum dimana tuantanah belum mau mengadakan perdjandjian dengan penggarap sesuai dengan UUPBH, kaum tani telah memutuskan untuk mengambil 6 bagian, dan 4 bagian selebihnja dibagi: 2 bagian untuk Pemerintah dan 2 bagian lagi untuk tuantanah. Djadi, Pemerintah memperoleh bagian daripada

hasilbumi langsung dari penggarap dan dengan demikian dibantu dalam usaha²nja untuk mengatasi kesulitan² pangan. *Untung bagi kaum tani,* karena bisa sedikit mengurangi penghisapan jang mereka alami turun-temurun selama ber-abad², untuk sedikit memperbaiki taraf-hidup mereka serta memperkuat daja-produksi mereka. *Untung bagi revolusi,* karena mempertjepat penjelesaian tugas dalam tahap pertama ini, jaitu untuk mengikis habis sisa² feodalisme.

Aksi² sefihak itu merupakan perwudjudan jang djelas sekali daripada tugas „social support" dan „social control", jaitu dukungan terhadap undang² negara dan dukungan terhadap sinjalemen jang berulang kali diutjapkan oleh Presiden tentang pelaksanaan undang² jang seret, pengawasan terhadap alat² negara jang tidak mau melaksanakannja dan pengikutsertaan kaum tani sendiri jang mau melaksanakan undang² tsb. Dan sesuai dengan itu, kaum tani sudah semakin tadjam dalam melakukan pengawasan terhadap alat² negara sendiri, jaitu dalam menuntut rituling terhadap penguasa² jang menentang, menghambat ataupun tidak mau membantu pelaksanaan kedua undang² itu.

Disini kita melihat suatu perpaduan antara apa jang sering dikatakan oleh Bung Karno tentang perlu adanja „revolusi *dari atas dan dari bawah* ..... Dari atas, dengan adanja rituling terhadap aparat dan sistim, dari bawah, karena rituling aparat dan sistim itu dilakukan sesuai dengan

desakan Rakjat dan didukung pula oleh Rakjat" („Djarek", lihat *Tubapi*, hal. 241).

Demikian tjontoh dari adanja dua segi dalam kekuasaan negara dalam hal pelaksanaan tugas demokratis revolusi kita, jaitu tugas anti-feodalisme. Bisa disimpulkan bahwa, berdasarkan pengalaman² kaum tani sendiri, segi pro-Rakjat sedjauh mengenai pelaksanaan tugas anti-feodalisme ini masih lemah sekali, artinja masih terlalu sedikit pengertian dikalangan alat² negara tentang landreform sebagai bagian mutlak daripada revolusi kita.

Bagaimana halnja dengan pelaksanaan tugas² anti-imperialisme revolusi kita? Dalam hal ini, saja rasa bahwa segi pro-Rakjat semakin lama semakin berdominasi. Berkat adanja pimpinan jang konsekwen dan anti-imperialis dari Bung Karno sendiri, berdasarkan desakan jang terus-menerus dari Rakjat sendiri untuk madju terus, pantang mundur dalam melakukan politik konfrontasi terhadap imperialisme, kolonialisme dan neo-kolonialisme, maka seluruh negara kita semakin mengarahkan sepak-terdjangnja kepada musuh pokok dari revolusi kita, imperialisme dunia, terutama imperialisme AS.

Dalam hal inipun, kita dapat merasa betapa penting peranan „social support" serta „social control" jang dilakukan setjara tekun dan terus-menerus dalam bidang politik luarnegeri kita. Gerakan Rakjat terus-menerus memegang peranan

jang menentukan dalam menuntut supaja djalan jang diambil dalam menjelesaikan masalah „Malaysia" jalah djalan revolusioner, menolak djalan likwidasionis, baik jang avonturis maupun jang oportunis.

Tanpa adanja „social support", „social control" dan kesedaran politik Rakjat jang sedemikian tinginja, dapat dipastikan bahwa negeri kita sudah sedjak lama terdjerumus kedalam djalan oportunis jang mau menjerah kepada fihak musuh dengan dalih „membereskan ekonomi dahulu" atau kedalam djalan avonturis jang setjara sembrono mau „membebaskan" Rakjat Kalimantan Utara tanpa mengakui bahwa peranan Indonesia dalam hal perdjuangan ini, betapapun pentingnja, tak mungkin lebih daripada *membantu* Rakjat Kalimantan Utara dalam membebaskan diri.

Dwikora jang diumumkan oleh Presiden Sukarno pada tgl 3 Mei jl. benar² mentjerminkan djalan revolusioner, djalan Rakjat. Komando jang pertama menekankan kepada memperhebat ketahanan revolusi, artinja ketahanan nasional dalam menghadapi pergolakan dan konfrontasi dengan projek neo-kolonialisme „Malaysia". Rumusan ini menundjukkan bahwa membereskan hal² nasional seperti misalnja ekonomi harus merupakan bagian jang tak terpisahkan daripada konfrontasi itu sendiri. Maka gugurlah keinginan² mereka jang mau „membereskan ekonomi dahulu". Hubungan jang tepat telah diletakkan, jaitu ekonomi nasional harus

dibereskan *dalam rangka* perdjuangan melawan imperialisme dan untuk memperkuat ketahanan negeri kita dalam menghadapi perdjuangan itu. Bukan „ekonomi sekarang, anti-imperialisme nanti sadja", jang berarti ekonomi tidak akan beres dan anti-imperialisme tidak akan dilakukan, melainkan „ekonomi sekarang, anti-imperialisme djuga sekarang" sebagai djaminan ekonomi akan bisa beres dan anti-imperialisme bisa djalan terus. Ekonomi kita belum beres sekarang ini bukannja karena kita terlalu banjak mengganjang imperialisme, tetapi djustru karena kita belum tjukup banjak mengganjang imperialisme, chususnja dibidang ekonomi.

Komando kedua daripada Dwikora dengan tepat menjatakan peranan Rakjat Indonesia, jaitu „membantu perdjuangan revolusioner Rakjat² Malaya, Singapura, Sabah, Serawak dan Brunai", sedangkan tudjuan perdjuangan kita sudah dinjatakan tanpa tedeng aling², jaitu „untuk membubarkan negara boneka 'Malaysia'." Perintjian tentang tindakan² jang dibutuhkan dalam melaksanakan komando kedua ini telah disusun oleh DPA dalam sidangnja dari tgl 6 — 9 Mei jl, jaitu *pertama*, bahwa perundingan² hanja dapat diadakan djika benar² bersih dari pengaruh² imperialis Inggris dan AS, artinja, a.l. djika tentara Inggris ditarik mundur dari Kaltara, Malaya dan Singapura; *kedua*, memobilisasi sokongan seluruh Nefo kepada perdjuangan untuk membubarkan „Malaysia"; dan *ketiga*, menjokong Pemerintah Azahari, meng-

akuinja dan membantu tentaranja dengan sukarelawan².

Dwikora sepenuhnja menggariskan djalan revolusioner dalam menghadapi „Malaysia" karena mementingkan masalah ketahanan kita sendiri jang terutama mengharuskan kita untuk memperkuat persatuan nasional, mementingkan perdjuangan dan persatuan Rakjat² didaerah „Malaysia" sendiri, serta mementingkan sokongan dan persatuan seluruh Nefo terhadap perdjuangan melawan „Malaysia" ini.

Dilihat dari segi Dwikora, tidak berhasilnja KTT Tokio mentjapai persetudjuan dalam bulan Djuni jbl. adalah wadjar, karena fihak Indonesia bertudjuan membubarkan „Malaysia" sedangkan Tengku Abdulrachman sesuai dengan politik madjikannja Inggris, bertudjuan membubarkan pasukan² gerilja di Kalimantan Utara. Ini bukan kegagalan bagi Indonesia, tetapi penegasan lebih landjut tentang djalan revolusioner jang ditempuh Pemerintah dan Rakjat Indonesia.

Saja menegaskan masalah Dwikora dalam rangka tjeramah ini karena ia sungguh merupakan tjontoh terbaik selama ini daripada hasil perdjuangan Rakjat melalui „social support" dan „social control" dengan mengalahkan matjam³ djalan lain jang selalu mau dipaksakan oleh unsur² anti-Rakjat dalam kekuasaan negara kita.

Tetapi walaupun kita bisa menjambut gembira hasil perdjuangan ini, namun perlu ditjatat pula

bahwa adanja dua segi dalam kekuasaan negara tentu masih mendapatkan refleksinja dalam perkembangan politik luarnegeri kita. Sudah diketahui umum bahwa prinsip terpenting dalam politik luarnegeri RI jalah anti-imperialisme. Ini sudah djelas dari berbagai dokumen resmi, terutama tiga kerangka Manipol, dan sudah ber-ulang² ditekankan dalam pidato² Presiden Sukarno sendiri.

Dalam mendjalankan politik anti-imperialis, jang harus djelas jalah siapa kawan dan siapa lawan, pertama-tama tentang siapa lawan, karena seperti Bung Karno pernah mengatakan, karena itulah jang menentukan „apa jang harus dihantam". Masalah siapa lawan dan siapa kawan adalah segi terpenting dalam melakukan politik luarnegeri anti-imperialis setjara efektif.

Ada fihak² jang suka banjak berbitjara tentang anti-imperialis, tetapi tak pernah tegas tentang siapa² imperialis jang harus dilawan itu. Rakjat Indonesia sudah ber-puluh² tahun terlatih dalam melakukan perdjuangan melawan imperialisme, terutama melawan imperialisme Belanda dan achir² ini melawan imperialisme Inggris. Pengalaman perdjuangan jang lama ini memberikan satu peladjaran jang perlu sekali kita fahami, jaitu tak pernah perdjuangan kita, baik melawan imperialisme Belanda maupun Inggris, bisa berlangsung tanpa sekaligus menghadapi tjampurtangan kaum imperialis Amerika Serikat. Tjampurtangan itu mengambil ber-

bagai bentuk seperti misalnja desakan² kepada kita untuk menjerah kepada kaum kolonialis, seperti ber-ulang² dilakukan selama Revolusi 1945 dan seperti achir² ini mereka usahakan mengenai konfrontasi jang kita lakukan dengan „Malaysia"; intervensi tertutup atau terbuka dalam urusan dalamnegeri kita, seperti misalnja selama pemberontakan „PRRI-Permesta" dengan serangan² udara oleh serdadu bajaran imperialis AS, Pope; intimidasi kaum imperialis AS dengan Armada ke7-nja pada waktu ini; usaha² kaum imperialis AS untuk bertindak sebagai „perantara" antara RI dengan kolonialisme jang sedang dihadapinja jang selalu ditudjukan kepada mematahkan semangat berdjuang Rakjat kita, dsb, dsb.

Maka dapatlah kita tarik kesimpulan, bahwa baik dahulu maupun sekarang, perdjuangan anti-imperialis Rakjat Indonesia walaupun umumnja menghadapi suatu imperialisme tertentu, namun musuhnja jang paling tetap, paling litjik dan paling berbahaja jalah imperialisme AS. Kenjataan ini lebih² dirasakan achir² ini dimana kaum imperialis AS sekaligus melakukan berbagai usaha terhadap kita. Paksaan setjara „halus" melalui „bantuan luarnegeri", paksaan setjara kasar melalui Armada ke-7, usaha² melalui saluran² duta-besar AS di Djakarta, Howard P. Jones, untuk mendesak² kepada pimpinan kita supaja mau berunding dengan „Malaysia" dsb. Adalah tepat sekali ketika DPA menekankan dalam keputusan sidang-

nja jang terachir sebagai djawaban tegas terhadap kaum imperialis AS itu, bahwa satu²nja perundingan dengan „Malaysia" jang bisa dipertimbangkan jalah „perundingan² tanpa prasjarat dan jang betul² bersih dari pengaruh Inggris dan Amerika".

Achir² ini, seluruh Rakjat Indonesia dengan aktif melakukan peranan „social support" dan „social control" dibidang politik luarnegeri dengan melalui berbagai gerakan, terutama gerakan menolak Armada ke-7 jang mengambil bentuk boikot terhadap film² AS, aksi² melawan „peace corps" dan aksi² jang menuntut supaja duta-besar AS Jones dinjatakan sebagai „persona non grata".

Tetapi harus diingat bahwa imperialisme AS jang kita hadapi dinegeri kita tidak lagi mengambil bentuk kolonialisme klasik, melainkan mengambil bentuk kolonialisme baru atau neo-kolonialisme artinja daja-upaja kaum imperialis untuk menundukkan negeri kita setjara politis, ekonomis dan militer dilakukan tidak melalui pendudukan langsung melainkan melalui „bantuan ekonomi", infiltrasi dibidang kebudajaan, tjampurtangan dalam urusan dalamnegeri dsb.

Oleh karena itu semua, tak tjukup kalau politik anti-imperialis dinjatakan setjara umum sebagai „menentang imperialisme dan kolonialisme". Rumusan itu harus ditambahkan dengan dua unsur jang djustru memberikan kepadanja makna jang efektif, jaitu *perlawanan terhadap neo-kolonialisme dan*

terutama perlawanan terhadap imperialis AS. Dengan perumusan ini mendjadi djelas siapa lawan revolusi Indonesia. Kalau mau disingkat, misalnja, tak tjukup berbitjara tentang anti-kolim atau anti-imkol, tetapi harus berbitjara tentang anti-imkolneo, dan lebih² dari itu, „anti-imkolneo, terutama imkolneo AS". Baru dengan demikian bisa dikatakan bahwa rumusan itu mengandung setjara lengkap musuh² revolusi kita jang harus kita ganjang terus-menerus. Hal ini diperkuat lagi oleh berita kemarin tentang 240.000 serdadu Amerika Serikat jang sudah siap untuk beroperasi di Asia Tenggara, dengan tulangpunggungnja Armada ke-7 AS dan perlengkapannja akan dibongkar di Muang Thai. Kaum imperialis AS mengira bahwa dengan ini Rakjat akan mendjadi takut. Tidak, jang benar jalah Rakjat makin meluap kebentji-annja pada imperialisme AS.

Kalau masalah siapa lawannja Revolusi Indonesia sudah djelas, sekarang timbul masalah siapa kawannja. Masalah ini sebenarnja sudah terang sekali, tetapi sajang hal² jang sebegitu terang masih djuga ternjata „gelap" bagi sementara orang. Kawan kita dalam perdjuangan anti-imperialis jalah „the new emerging forces" atau Nefo, tetapi masih sadja ada orang² jang menutup mata terhadap kenjataan bahwa Nefo itu merupakan suatu tritunggal, jaitu negeri² baru merdeka jang anti-imperialis, negeri² sosialis dan kekuatan² progresif didalam negeri kapitalis. Ada sadja orang dalam

tahun 1964 ini jang menggambarkan Nefo sebagai negeri² AA sadja, atau negeri² AAA sadja, sedangkan negeri² sosialis ditempatkan diluar barisan Nefo, dinjatakan sebagai barisan jang merupakan salahsatu fihak dalam apa jang dinamakan ,,cold war", jang digambarkan sama djeleknja bahkan lebih djelek daripada fihak kaum imperialis AS. Orang² ini mengatakan bahwa ,,fihak Sovjet" mau ,,mendjalankan revolusi dunia" sedangkan Amerika Serikat hanja mau ,,membela diri terhadap bahaja Komunis". Kalau hanja untuk membela diri mengapa AS mengirimkan begitu banjak serdadu ke Asia Tenggara jang begitu djauh letaknja dari wilajah AS?

Analisa jang menempatkan Nefo sebagai kelompok tambahan disamping fihak Barat dan fihak Timur djustru sama dengan analisa ,,blok ketiga" jang sudah sedjak Konferensi Beograd dalam tahun 1961 dikritik tanpa ampun oleh Bung Karno. Nefo meliputi negara² sosialis dan hal ini tak boleh dilupakan karena negara² sosialis merupakan kekuatan pendukung jang sangat penting dalam perdjuangan anti-imperialis dari Rakjat² sedunia. Tak boleh diabaikan bahwa negara² sosialis merupakan salahsatu sumber dukungan terpenting dalam perdjuangan anti-imperialis. Tak perlu saja mengutip pidato Bung Karno ini atau pidato Bung Karno itu tentang komposisi Nefo Tjukup kalau saja sebut sadja Ganefo jang njata² meliputi djuga negara² sosialis. dan bahkan negara² sosialis Asia seperti RRT dan Korea mentjapai prestasi² jang sungguh mengagumkan dalam Ganefo itu. Tetapi ada sadja orang², termasuk orang² dalam aparat negara, jang tidak mengerti atau mungkin tidak mau mengerti bahwa komposisi Nefo meliputi djuga negeri² sosialis.

Disinilah terasa peranan penting daripada ,,social support" dan ,,social control" dalam bidang politik luarnegeri; oleh karena itu selalu dibutuhkan perdjuangan terus-menerus untuk memenangkan pengertian tepat tentang siapa lawan dan siapa kawan Revolusi Indonesia dalam melakukan perdjuangan anti-imperialisme. Selama soal ini belum djelas bagi semua alat negara, Rakjat akan harus terus berdjuang dengan melakukan gerakan² jang kongkrit untuk membikin masalah ini mendjadi sedjelas²nja.

Satu tjontoh lagi mengenai adanja segi anti-Rakjat dan segi pro-Rakjat dalam kekuasaan negara jalah tindakan² teror ekonomi 26 Mei 1963 jang terkenal itu. Peraturan² itu ternjata tidak dapat hidup lebih dari sepuluh bulan karena perlawanan keras dari seluruh Rakjat jang sudah tjukup berpengalaman dalam menghadapi berbagai serangan terhadap ekonomi negerinja dan terhadap taraf-hidup mereka sendiri.

Tindakan² 26 Mei itu dilakukan baru dua bulan setelah diumumkannja Deklarasi Ekonomi. Seperti kita semua mengetahui, Dekon itu disambut hangat oleh seluruh Rakjat, sedangkan tindakan² 26 Mei

baru 2 bulan kemudian diprotes keras sehingga achirnja ditarik kembali oleh Pemerintah. Bukankah ini suatu tjontoh jang sangat djelas tentang adanja segi pro-Rakjat jang bisa menghasilkan suatu dokumen jang revolusioner seperti Dekon dan jang mendapatkan „social support", disamping segi anti-Rakjat jang bisa menghasilkan peraturan² 26 Mei jang begitu memukul Rakjat sehingga diprotes melalui „social control"?

Perdjuangan jang dilakukan untuk menuntut pembatalan peraturan² 26 Mei telah membawa hasil pertama jaitu pembatalan peraturan² pokok jang diadakan pada tanggal 26 Mei itu. Tetapi peraturan² baru jang dikeluarkan pada tanggal 17 April 1964 masih terlalu sedikit menggambarkan keinginan Rakjat seperti jang diwakili dalam usul² jang diadjukan kepada Pemerintah oleh DPRGR walaupun usul² itu hanja bersifat minimal.

Kenaikan harga samasekali belum dapat distop dengan adanja peraturan² 17 April, sebaliknja terus meningkat, dan belum ada tanda bahwa kematjetan produksi dalamnegeri akan bisa didobrak. Kenjataan ini djelas menundjukkan bahwa perdjuangan Rakjat masih harus dilandjutkan untuk memenangkan konsepsi² jang sesuai dengan Dekon dan jang bisa mengatasi kesulitan² ekonomi jang masih kita hadapi.

Perdjuangan untuk memenangkan konsepsi² Rakjat dalam bidang ekonomi adalah penting sekali karena sudah tjukup banjak bukti bahwa kaum

reaksioner dalamnegeri jang telah menjatukan diri dengan kaum imperialis dan chususnja dengan projek neo-kolonialisme „Malaysia" sangat bernafsu dalam keinginan mereka agar ekonomi Indonesia dibiarkan mendjadi semakin bobrok sehingga achirnja ahli² merekalah jang akan ditawari untuk „menjelamatkan" Indonesia dari keambrukan ekonomi. Perdjuangan untuk menanggulangi kesulitan² ekonomi merupakan bagian integral daripada perdjuangan melawan imperialisme, kolonialisme dan neo-kolonialisme. Pengalaman² mengenai 26 Mei mengadjarkan kepada kita, bahwa hanja prinsip berdiri diatas kaki kita sendiri, prinsip patriotisme ekonomi seperti ditekankan oleh Presiden Sukarno dalam Gesuri, bisa membuka kemungkinan bagi kita untuk mengatasi kesulitan² ekonomi dan sekaligus mengachiri tjampurtangan kaum imperialis dalam urusan ekonomi negeri kita. Dengan demikian djelaslah bahwa perdjuangan Rakjat Indonesia menuntut penghapusan peraturan² ekonomi 26 Mei 1963 merupakan bagian integral daripada perdjuangan untuk melawan intervensi imperialis.

Sebagai achir kata dalam membahas tugas² chusus „social support" dan „social control" dalam revolusi Indonesia dewasa ini, perlu ditekankan bahwa ada „social control" jang efektif dan ada jang kurang efektif. „Social control" jang seratus persen efektif dan sebagai hasilnja memperkuat „social support" hanjalah bisa terdjadi didalam

sistim masjarakat Sosialis. „Social control" jang efektif pada pokoknja bisa terdjadi djika diantara pemerintah atau negara tidak terdapat kontradiksi jang tadjam dengan Rakjat banjak. Ini berarti djuga bahwa pemerintah atau negara itu sungguh² mentjerminkan atau mewakili keinginan dan kepentingan Rakjat banjak. Djadi, meskipun pemerintah atau negara itu benar² sudah satu haluan politiknja dengan jang dikehendaki oleh Rakjat banjak, tetapi „social control" itu tetap diperlukan.

Oleh karena itu adalah mutlak perlu dilakukan dan malahan dilakukan dengan seluas mungkin „social control" tenhadap pemerintah dan segala aparat negara Republik Indonesia oleh Rakjat banjak, djustru karena Pemerintah dan segala aparatnja mempunjai garis dan pedoman politik jang satu seperti jang dimiliki oleh Rakjat banjak, jalah Manipol dengan segala pedoman pelaksanaannja. Djadi „social control" ini mutlak diperlukan, karena ia djustru merupakan djaminan jang tepertjaja bagi pelaksanaan garis² besar haluan negara, jaitu Manipol, jaitu djaminan bahwa pemerintah dan segala aparatnja benar² berbitjara dan bertindak sesuai dengan isi dan semangat Manipol. Hanja dengan berbuat demikian Republik kita serta segenap aparatnja akan mendapat „social support" jang diperlukan.

3

Sjarat² Pelaksanaan „Social Support" dan „Social Control"

Diatas, telah saja djelaskan bahwa „social support" dan „social control" mempunjai hubungan erat dengan tugas untuk menjelesaikan revolusi Indonesia, bahkan hal jang mutlak perlu kalau mau menjelesaikan tuntutan² revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar²nja. Problim jang terachir jang saja anggap perlu diadjukan jalah tentang sjarat² pelaksanaanja. Masalah sjarat² ini memang djuga diadjukan dalam pokok² jang diminta dari saja oleh pimpinan SESKOAD dimana ditanjakan: „Apa masalah² untuk mensukseskan Sistim Penjelenggaraan Social Support dan Social Control tersebut"? Pertanjaan itu saja anggap tepat karena apa sadja jang baik tak mungkin terselenggara djika tidak tersedia sjarat²nja.

Masalah ini membawakan kita langsung kepada masalah kedudukan partai² politik, karena partai² itu memang merupakan saluran terpenting bagi „social support" dan „social control". Sudah dari dulu, terdengar suara² beratjun jang menjebarkan ide bahwa sistim kepartaian tak punja hak hidup

lagi dalam alam demokrasi terpimpin. Usaha² untuk mematikan peranan partai² politik telah mengambil berbagai bentuk. Mula² ada jang mengandjurkan supaja partai² politik dibubarkan sadja, kemudian pada waktu Front Nasional sedang dalam proses pembentukannja ada jang mau mendjadikan Front Nasional itu sebagai satu²nja Partai. Dan achir² ini ada kalangan² jang menggembar-gemborkan tentang perlu adanja satu partai sadja, dengan menjalahgunakan utjapan² Presiden Sukarno tentang „suatu partai pelopor".

Pengertian² ini adalah keliru sekali dan berlawanan dengan tudjuan revolusi kita. Bukankah suatu kenjataan jang tak bisa disangkal bahwa lahirnja gerakan nasional dinegeri kita djustru dimulai dengan lahirnja partai² politik, bahwa sedjarah gerakan nasional kita adalah sedjarah berkembangnja partai² politik, malahan lahir dan berkembangnja nasion Indonesia sendiri tak mungkin di-pisah²kan dari lahir dan berkembangnja partai² politik dinegeri kita.

Partai² politik merupakan alat² klas untuk memperdjuangkan kepentingan² klas. Revolusi Indonesia pada tahap sekarang merupakan revolusi dimana semua klas anti-imperialis ikut serta didalamnja dengan tudjuan melawan imperialime, musuh pokok Rakjat Indonesia. Dengan demikian partai² politik revolusioner tidak hanja alat klas atau golongan tertentu tetapi djuga alat nasion untuk memenangkan revolusi nasional. Partai² politik revolusioner sudah merupakan alat revolusi sedjak sebelum Revolusi Agustus 1945. Karena revolusi Indonesia dewasa ini adalah revolusinja berbagai klas, maka tidaklah mengherankan kalau ada berbagai partai. Bahkan djustru seandainja hanja terdapat satu partai seperti apa jang diandjurkan sementara orang, adalah samasekali tidak sesuai karena tak bisa membuka kemungkinan bagi setiap klas untuk memberi sumbangannja se-besar²nja dalam perdjuangan anti-imperialis.

Disamping itu, ada djuga kalangan jang berusaha menjebarkan ide bahwa kegiatan² partai seperti misalnja kegiatan²nja melalui berbagai media termasuk pers, gerakan² massa, aksi² jang digerakkan dari bawah untuk menuntut rituling merupakan „gedjala² liberalisme". Tentu kesimpulannja jalah bahwa kegiatan² „liberal" itu dus harus diberantas.

Apakah benar sangkaan sementara orang bahwa kegiatan² partai, tuntutan² tentang rituling, aksi² massa untuk menuntut ini atau itu dari Pemerintah, dsb. perlu ditjela sebagai „gedjala² liberalisme" jang harus diberantas? Tentu hal ini adalah samasekali tidak benar! Tjobalah batja Tubapi, jang terdiri dari lebih 800 halaman. Tidak satu katapun disitu jang sedikit mengantjam hak partai² politik untuk hidup dan bergerak. Bahkan sebaliknja. Dalam „Djarek", Presiden berkata bahwa program revolusi, jaitu Manipol, harus mendjadi program setiap partai jang djuga harus ambilbagian dalam

melaksanakan program tsb. Dengan mengutip Manipol, Presiden berkata dalam „Djarek" : „Sudah tentu tiap partai, organisasi dan perseorangan boleh mempunjai kejakinan politiknja sendiri, boleh mempunjai program sendiri ....." (*Tubapi*, hal. 208).

Berbitjara tentang rituling sistim kepartaian, Presiden dengan tegas menjatakan bahwa Penetapan Presiden No. 7, 1959 dan Peraturan Presiden No .13, 1960 „pada pokoknja tegas² memberi hak-hidup kepada partai² jang ber-USDEK" (*Tubapi*, hal. 211). Dan lebih tegas lagi dikatakan oleh Presiden selandjutnja dalam pidato Djarek itu sbb : „Dengan tegas saja katakan disini bahwa partai itu, dengan memenuhi semua sjarat² perundang-undangan kepartaian, diberi hak hidup, diberi hak bergerak, diberi hak perwakilan — sudah barang tentu dalam rangka Demokrasi Terpimpin. Partai jang demikian itu dapat memberi sumbangan besar kepada terlaksananja Amanat Penderitaan Rakjat".

Perlu ditekankan dalam hubungan ini, bahwa kritik² terhadap partai² sungguh tak beralasan, apalagi mengingat bahwa djustru partai² itu jang sudah mengalami rituling seperlunja sehingga partai² jang ada umumnja berpegang kepada Manipol dan Nasakom. Bidang² lain malahan bisa mengambil tjontoh dari rituling dan perkembangan dalam sistim kepartaian. Kalau semua bidang telah melaksanakan rituling sampai taraf jang telah dilaksanakan dalam bidang kepartaian, kita sungguh² akan bisa makin mendekati tudjuan revolusi kita dalam tahap pertama ini. Sistim kepartaian di Indonesia adalah pelopor dalam rituling.

Liberalisme jang dihantam berulangkali oleh Bung Karno dalam berbagai pidato bukanlah kegiatan² partai² politik melainkan politik² reaksioner, sikap jang membiarkan kegiatan² kaum reaksioner sampai kepada membiarkan pemberontakan dan subversi asing, semuanja atasnama „demokrasi". Dalam Manipol, Presiden Sukarno dengan djelas sekali menerangkan tentang apa liberalisme itu. Disitu dikatakan sbb : „Bapakisme, daerahisme, politik territorial sendiri², dewan-dewanan, PRRI, Permesta dan lain² borok dan koreng sematjam itu, pada hakekatnja semua ber-ibu kepada liberalisme jang membolehkan setiap orang sa-kersa²nja sendiri, ketambahan lagi dengan kipasannja dan bantuannja subversi asing. Stop keadaan jang demikian itu!" (Lihat pidato *Manipol*, dalam Tubapi, hal. 121). Njata sekali bahwa apa jang dimaksudkan dengan liberalisme oleh Bung Karno bukanlah kegiatan² partai, aksi² dsb., melainkan kegiatan kaum reaksioner dalam menghambat dan menggerowoti penjusunan kekuatan revolusi kita.

Demokrasi Terpimpin setjara hakekat berbeda dengan itu djustru karena tidak membiarkan kaum reaksi untuk menggerowoti dasar² negara kita. Demokrasi Terpimpin adalah tetap demokrasi, tetapi demokrasi jang tidak sudi memberikan hak-

hidup kepada kaum reaksioner karena kaum reaksioner itu djustru bermaksud untuk mematikan demokrasi itu dan mendjual negeri kita kepada kaum imperialis. Demokrasi liberal membiarkan kaum reaksioner untuk menggunakan demokrasi sebagai selimut dalam melakukan kegiatan² antidemokratis mereka. Demokrasi terpimpin memastikan Manipol sebagai konsepsi jang harus memimpin semua, dan setjara wadjar hanja memberi hakhidup kepada mereka jang demokratis. Ini bedanja antara demokrasi palsu dan demokrasi sedjati.

Bung Karno sendiri sudah berulangkali berbitjara tentang peranan partai² politik. Bahkan dalam bukunja *Mentjapai Indonesia Merdeka* jang ditulis dalam tahun 1933, dimuat suatu bab chusus jang berdjudul „Gunanja Ada Partai". Dalam bab itu, Bung Karno dengan gamblang mendjelaskan peranan massa-aksi sebagai peranan revolusioner dan bukan peranan reformis, jaitu peranan „sebagai penghantar pada saat masjarakat tua melangkah kedalam masjarakat baru" *(Dibawah Bendera Revolusi,* hal. 281). Dan siapa menurut Bung Karno jang harus memimpin massa aksi itu? Partai² politik, demikian djawabnja. „Partailah jang memimpin massa itu didalam perdjuangannja merebahkan musuh, partailah jang memimpin komando daripada barisan massa". *(Dibawah Bendera Revolusi,* hal. 282). Demikian tugas revolusioner jang diletakkan oleh Bung Karno atas pundak partai², Bahkan peranannja bersifat mutlak bagi

tertjapainja kemenangan. Tentang ini Bung Karno berkata: „Kemenangan sudah bisa datang, bilamana ada satu partai jang gagah-berani dan bewust mendjadi *pelopor sedjati* daripada massa" *(Dibawah Bendera Revolusi,* hal. 283).

Tetapi kalau Bung Karno berbitjara tentang „satu partai", maksudnja samasekali bukan „satu²nja partai". Jang dimaksudkan jalah *satu partai pelopor,* jaitu partai „jang paling baik dan paling sempurna". Selandjutnja dikatakan: „Bisa ada partai lain² ..... jang ..... ikut berdjuang, ikut memimpin, tetapi tidak sebagai komandan seluruh tentaranja massa, melainkan hanja sebagai sersan² atau kopral² sadja". *(Dibawah Bendera Revolusi,* hal. 284).

Andjuran Bung Karno dimuka Kongres PNI di Purwokerto tahun jang lalu kepada semua partai untuk ber-lomba² atau berkompetisi dalam memperdjuangkan Manipol adalah sepenuhnja sesuai dengan konsepsi tentang partai pelopor itu. Andjuran itu menjerukan kepada partai² supaja mereka mendjadi giat terus-menerus demi terlaksananja program revolusi kita, jaitu Manipol. Perlombaan ini mengharuskan kepada semua partai untuk memperhebat amalnja kepada Rakjat demi mensukseskan Manipol. Dan walaupun perlombaan itu pasti achirnja akan menghasilkan satu partai pelopor, ini samasekali tidak berarti bahwa partai itu „menang" dan jang lain²nja „kalah". Dalam perlombaan jang demikian, kemenangan ada difihak

Rakjat seluruhnja, karena kemenangan berarti kemenangan program kita bersama, jaitu Manipol. Jang kalah hanja imperialisme dan feodalisme. Djadi, silahkan semua partai berdjuang untuk mendjadi partai pelopor. PKI djuga sudah dan akan terus berdjuang untuk itu.

Melakukan „social support" dan „social control" jang tudjuannja jalah menjelesaikan revolusi, bukan hanja mendjadi hak daripada partai² tetapi malahan mendjadi kewadjibannja karena, seperti didjelaskan oleh Bung Karno, kemenangan revolusi memang tergantung daripada perdjuangan massa jang dipimpin oleh partai².

Dari ini semua dapat kita simpulkan, bahwa adanja partai² jang Manipolis merupakan sjarat pertama bagi terselenggaranja „social support" dan „social control".

Disamping partai, djuga harus ada organisasi² massa (ormas²) jang mempunjai fungsi jang chusus dalam menggerakkan massa untuk memenangkan tuntutan² chusus menurut bidangnja. Ormas² memegang peranan jang penting sekali karena mereka dapat memperhatikan setjara lebih spesifik kebutuhan² dan tuntutan² golongan tertentu, misalnja kebutuhan² dan tuntutan² kaum tani, kebutuhan² dan tuntutan² kaum buruh, kebutuhan² dan tuntutan² pemuda, peladjar dan mahasiswa, kebutuhan² dan tuntutan² kaum wanita, dsb.

Selandjutnja, sjarat jang sangat penting bagi terselenggaranja „social support" dan „social control" jalah adanja kebebasan demokratis bagi partai² politik dan ormas² dalam melakukan kegiatan²nja. Sungguh suatu keanehan djika partai² dan organisasi² diakui mempunjai hak hidup, seperti dikatakan dengan djelas oleh Bung Karno dalam Manipol, Djarek dll., tetapi difihak lain ada orang² berkuasa jang mau mengekang partai² dan ormas² dengan melarang ini dan melarang itu, dengan menahan pemimpin² mereka jang sedang memimpin aksi massa, jang sedang mengambilalih perusahaan² Inggris sesuai dengan politik konfrontasi disemua bidang dsb, dsb.

Salahsatu alat penting lainnja untuk melakukan „social support" dan „social control" jalah Dewan² Perusahaan jang dapat merupakan saluran efektif terutama dalam mengikutsertakan semua fihak jang bersangkutan dalam usaha² melantjarkan djalannja perusahaan. Djuga pers Manipolis merupakan saluran „social support" dan „social control" jang amat penting.

4

Sembojan PKI „Tripandji Bangsa untuk Demokrasi, Persatuan, Mobilisasi !"

Dalam Kongres ke-VII (Luarbiasa) CC PKI jang diadakan dalam bulan April tahun 1962, PKI telah mengadjukan suatu sembojan baru, jaitu *Tripandji Bangsa*: Pandji *Demokrasi*, Pandji *Persatuan* dan Pandji *Mobilisasi*. Sembojan itu diserukan untuk mensukseskan perdjuangan membebaskan Irian Barat dan selandjutnja telah dikembangkan terus untuk menghadapi tugas² urgen jang harus dilaksanakan oleh Rakjat Indonesia. Sembojan itu berarti, bahwa perdjuangan revolusioner tak mungkin mentjapai sukses kalau tidak ada demokrasi. Demokrasi adalah sjarat mutlak untuk memperkuat persatuan nasional, untuk dapat memobilisasi segenap potensi nasional. Harus senantiasa diingat, bahwa bagaimanapun Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi; djika tidak, tentu namanja akan lain.

Kegiatan² „social support" dan „social control" berarti memobilisasi segenap potensi nasional untuk mengawasi dan memberi dukungan kepada pelaksanaan program Pemerintah dan pelaksanaan

program revolusi. Sjarat mutlak dalam mensukseskan mobilisasi itu jalah adanja demokrasi — tentunja, demokrasi untuk Rakjat dan bukan demokrasi untuk musuh² Rakjat. Oleh karena itu, perdjuangan jang dilakukan oleh segenap Rakjat untuk mempertahankan kebebasan² demokratis dan untuk memperluas kebebasan² itu merupakan bagian integral daripada perdjuangan untuk menjelesaikan tuntutan² revolusi sampai ke-akar²nja.

Selama beberapa tahun terachir ini, Rakjat Indonesia telah melakukan perdjuangan sengit untuk kebebasan² demokratis dengan didjiwai oleh kesedaran politik jang tinggi. Berkat perdjuangan sengit itu pada pokoknja telah dapat digagalkan usaha² untuk mengadakan „SOB tanpa SOB" walaupun masih ada sadja tindakan² untuk mempertahankan keadaan „SOB" dalam alam tertib-sivil jang sekarang berlaku. Sedjak berachirnja SOB pada tgl 1 Mei 1963, telah terdjadi suatu perluasan sedikit demi sedikit dalam kebebasan² demokratis, misalnja dalam bidang penerbitan suratkabar², brosur², madjalah² dsb., dalam hal mengadakan rapat², dan dalam melakukan kegiatan² politik pada umumnja. Semuanja ini sangat penting baik bagi pengganjangan „Malaysia" maupun bagi pengganjangan kontra-revolusi dalam-negeri, peningkatan produksi dsb., pendeknja bagi perdjuangan anti-imperialisme dan anti-feodalisme pada umumnja.

Dalam keadaan demikian telah terdjadi suatu

gelombang naik dalam perdjuangan Rakjat Indonesia untuk melakukan „social support" dan „social control". Ini dapat dibuktikan dengan berbagai aksi jang sudah atau sedang dilakukan untuk menuntut rituling orang² anti-Manipolis dan menuntut nasakomisasi semua sektor kehidupan, terutama kehidupan politik dan ekonomi. Bahkan tuntutan² supaja PARAN diritul dan diganti dengan aparat rituling jang berporoskan Nasakom dibawah pimpinan Presiden Sukarno sendiri, sesuai dengan DEKON, telah mulai berhasil dengan pembubaran PARAN dan pembentukan KOTRAR. Kedjadian ini telah lebih membangkitkan lagi kegiatan² organisasi² massa revolusioner untuk menuntut rituling, seperti dapat kita lihat, misalnja, dalam aksi² jang sedang dilantjarkan dalam menuntut supaja perguruan tinggi dimanipolkan, terutama sesudah Manikebu dilarang oleh Presiden Sukarno.

Semua perkembangan ini menandakan bahwa perkembangan politik dinegeri kita sedang berkembang dengan baik sekali, artinja baik untuk Rakjat termasuk TNI, dan hanja tidak baik untuk musuh² Rakjat, artinja baik untuk revolusi dan tidak baik unuk kontra-revolusi. Dengan semakin berkembangnja hak² demokrasi dan dengan semakin berkembangnja „social support" dan „social control", dapat dipastikan, bahwa kemenangan revolusi semakin dekat. Tetapi optimisme ini tidak boleh membikin kita lupa, bahwa musuh² Rakjat

tidak tinggal diam dan malahan akan mendjadi semakin nekad, dan akan berusaha dengan segala daja-upaja untuk membendung kemadjuan lebih landjut. Usaha² jang terutama dilakukan oleh kaum imperialis jalah memetjah-belah: memetjah-belah persatuan antara Bung Karno dengan Rakjat, antara Bung Karno dengan PKI, memetjah-belah persatuan Nasakom, mengadudomba TNI dengan PKI dan Kepolisian Negara dengan PKI dsb. Oleh karena itu, lebih² daripada sebelumnja diperlukan persatuan nasional jang harus terus-menerus dikonsolidasi. Oleh karena itu, kegiatan² „social support" dan „social control" harus dilakukan dengan tjara² jang sekaligus mengkonsolidasi persatuan nasional, persatuan segenap potensi nasional, termasuk pula Angkatan Bersendjata. Seperti digariskan oleh Manipol: Konsentrasi semua kekuatan nasional — inilah tugas, sendjata dan djaminan kemenangan kita.

Mudah²an sembojan „Dwitunggal Rakjat dan Angkatan Bersendjata" akan terus berkembang sebagai salahsatu sjarat mutlak bagi tertjapainja tudjuan seluruh Rakjat Indonesia, jaitu penjelesaian revolusi nasional-demokratis sebagai tahap jang mutlak harus dilalui sebelum memulai tugas revolusioner kita selandjutnja, jaitu pembangunan masjarakat sosialis Indonesia.

I S I

Sekedar pengantar 3

1. Masalah Revolusi dan Kekuasaan Negara Dalam Hubungannja dengan „Social Support" dan „Social Control" 11

2. Kekuasaan Negara di Indonesia Sekarang dan T'ugas² Chusus „Social Support" serta „Social Control" Dewasa ini 26

3. Sjarat² Pelaksanaan „Social Support" dan „Social Control" 49

4. Sembojan PKI „Tripandji Bangsa Untuk Demokrasi, Persatuan, Mobilisasi!" 58

SIP No. 440/JL/1964 — 10.000 ex.
P.I.R. 392/1964